

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya di negara-negara maju yang menerapkan desentralisasi atau otonomi daerah cenderung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang lukratif.¹ Menurut Soenyono pembentukan daerah otonom yang secara serentak merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif yang ada di daerah atau wilayah tertentu sebagai bagian bagi bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi kemudian dipecah menjadi daerah otonom. Oleh karena itu otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat umum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan setempat menurut aspirasi sendiri berdasarkan aspirasi, masyarakat.²

Selama ini Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki ciri-ciri utama kekuasaan yang sangat besar dan dominan pada pemerintah pusat yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk lebih banyak memberikan kewenangan kepada daerah dalam segala hal.³ Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

¹Soeradi, *Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

²Soenyono, *Otonomi Daerah: Peran Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 4.

³Sudarti, "Otonomi Daerah Dan Pola Hubungan Keuangan Pusat Daerah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1998, 203.

sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah diubah menjadi Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada Undang-Undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Hal yang paling utama yang mencirikan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada Pemerintah Pusat diusahakan seminimal mungkin. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang memiliki perekonomian yang baik. Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis di bidang industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat industri dan perdagangan. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerahnya sendiri agar tercapai kemandirian sebagai tujuan dari adanya otonomi daerah.

⁴Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati, " Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17, no. 1 (July 2017): 44.

Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah mengetahui kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.⁵Kinerja keuangan memiliki tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi organisasi yang terdapat dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Menurut Mahmudi analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan.

⁵Salman Alfarisi, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2015, 95.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena Pendapatan Asli Daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut termasuk Provinsi Jawa Timur yang notabennya termasuk provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah terbesar kedua di Indonesia. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari yang menyatakan bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah telah memiliki kinerja yang baik.

⁶Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 44.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.⁷Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus.⁸

Ajeng Apridiyanti melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Dalam penelitian ini data penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis desain kausal. Dimana desain kausal menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Namun, secara persial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.⁹

⁷Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris* (Malang: UB Press, 2019), 65.

⁸Agus Budi Santosa and Mohammad Ainur Rofiq, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur Periode 2007 - 2010,” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 20, no. 2 (September 2013): 185.

⁹Ajeng Apridiyanti, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017,” *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 4, no. 3 (September 1, 2019): 32– 41, <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>.

Fani Wiraswasta, M. Pudjihardjo, dan Putu Mahardika Adis melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal di Kota dalam wilayah Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam kategori *explanatory research* (penelitian penjelasan). Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan laporan keuangan daerah di Kota yang ada di wilayah Jawa Timur (kecuali kota Surabaya). Hasil penelitian tersebut menunjukkan semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Selain itu Helen Andaresta juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Size* Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel yang digunakan adalah metode sensus sampling. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019 dalam TribunNews.com, Anis menyoroti bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan, realisasinya selalu lebih rendah daripada anggarannya. Menurutnya Kinerja Keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung

¹⁰Fani Wiraswasta, M. Pudjihardjo, and Putu Mahardika Adis, “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur Tahun 2009-2014,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5, no. 2 (January 10, 2019), <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>.

pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut.¹¹ Menurut jatimprov.go.id realisasi pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp 31,631 triliun atau 104,94 persen. Capaian ini melebihi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 30,142 triliun.¹²

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Keuangan Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan informasi yang besar dalam peningkatan Kinerja Keuangan suatu pemerintah sehingga dapat menyukseskan pembangunan pemerintah. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

¹¹<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/rendahnya-realisisi-dana-alokasi-khusus-2017-2019-jadi-perhatian-legislator-pks?page=2> diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 09:13.

¹²<http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/gubernur-jatim-realisisi-pendapatan-daerah-provinsi-tahun-2020-capai-104-94-persen-> diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 08:54.

1. Apakah ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah ada Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti. Fungsi anggapan dasar dalam sebuah penelitian adalah sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian, untuk mempertegas variabel

yang diteliti, dan untuk menentukan dan merumuskan hipotesis.¹³ Kinerja keuangan dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan, diantaranya yaitu: Pendapatan Asli Daerah¹⁴, Belanja Modal¹⁵, Dana Perimbangan¹⁶, Ukuran Pemerintah Daerah¹⁷, Dana Alokasi Umum¹⁸. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Alokasi Umum dimana hal tersebut dianggap nilainya konstan (*Ceteris Paribus*).

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi *hypothesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian

¹³Institut Agama Islam Negeri Madura, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Revisi (Pamekasan, Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 17– 18.

¹⁴ Kusnadi Yudha Wiguna; Lis Djuniar dan Ida Zuraida; Budianto dan Stanly W Alexander.

¹⁵ Lis Djuniar dan Ida Zuraida; Cok Instri Nilam Kencana Ningrat dan Ni Luh Supadmi; Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko dan Jacline I. Sumual.

¹⁶ Budianto dan Stanly W Alexander; Swastika Enjang Prasasti; Toto Suwarsa dan Thayeb Ihsa Sawal.

¹⁷ Indah Puspa Sari; Helen Andaresta, Khairul Aswar dan Ermawati

¹⁸ Akbar Abdul Gafar; Kusnadi Yudha Wiguna; Zuwesty Eka Putri.

yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian dengan data di lapangan.¹⁹

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

H₂: Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

H₃: Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1. Secara Akademis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan terhadap pentingnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bagi kinerja keuangan.

b. Bagi IAIN Madura

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 85.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan atau perusahaan dan sebagai perbandingan serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, serta sebagai bahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menentukan preferensi masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup penelitian ini merupakan website resmi BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur yaitu <https://jatim.bps.go.id> dan situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui <http://www.djpk.depkeu.go.id> dengan objek penelitiannya adalah laporan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan ruang lingkup variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negative bagi variabel dependen nantinya. Variabel Independen juga disebut sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi.²⁰ Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ada 2 macam variabel, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2).

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang ada.²¹

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

²⁰ Situmorang dkk., *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 8.

²¹Carunia Mulya Firdausy, , *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 20.

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah atribut atau karakteristik yang bebas atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini menjadi objek utama dalam penelitian. Variabel dependen disebut pula sebagai variabel Y, terikat *outcome*, efek, kriteria dan variabel konsekuensi. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

a. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar²²

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah + Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah + Rasio Desentralisasi Fiskal.

H. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya makna. Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut

²² Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Banten: Desanta Multiavisitama, 2020), 2

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang ada.²³

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.²⁴

3. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah, guna memenuhi kebutuhan agar tidak tergantung pada Pemerintah Pusat.²⁵

²³Carunia Mulya Firdausy, , *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 20.

²⁴Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris*, 65.

²⁵Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 2.

Berdasarkan uraian definisi istilah di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan suatu analisis untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Penerbit	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ajeng Apridiyanti, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi.	Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Namun, secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
2	Putri Puspita Ayu, Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.	Adakah pengaruh antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3	Yuliasti Leki dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,	Apakah ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Pemerintah	Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

	Diponegoro Journal Of Accounting.	Kabupaten Halmahera Barat.	dengan metode kuadrat terkecil sederhana (<i>Ordinary Least Square</i>).	Kinerja Keuangan. Dan secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Halmahera Barat.
4	Helen Andaresta dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, <i>Size</i> Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.	Adakah pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, <i>Size</i> Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus sampling.	Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan mempunyai pengaruh negatif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, <i>Size</i> Pemerintah Daerah tidak mempunyai pengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5	Afia Maulina dkk, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Politeknik Keuangan Negara STAN.	Adakah pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan STATA (<i>Statistic/Data Analysis</i>)	Terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat hubungan yang positif yang tidak signifikan untuk variabel Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Dearah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6	Ade Pipit Fatmawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan	Apakah ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemeintah,

	Pemerintah Kota Cimahi, Jurnal Akuntansi Tahun XII No. 02 Bandung.	terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.	dengan perumusan masalah asosiatif dengan bentuk hubungan kausal.	sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.
7	Budianto dan Stanly W Alexander dkk, Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi Manado.	Apakah ada pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
8	Anak Agung Istri Agung Swadewi, Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keresasian Anggaran Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali Indonesia.	Apakah ada pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keresasian Anggaran Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	Data yang digunakan dalam penelitian adalah data akuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (<i>path analysis</i>).	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap keserasian anggaran, namun Dana Perimbangan tidak signifikan. Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran, sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Tahun penelitian ini adalah 2019-2020.

Berdasarkan hal tersebut penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Prpvinsi Jawa Timur periode 2019-2020 merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan.